

**KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**





# KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH



Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Graha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310

Telp. : (021) 3190-4232

Fax. : (021) 724-5078

email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

website: <http://www.iaiglobal.or.id>

*Cetakan Pertama*

Juni 2007

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

**Jakarta, 27 Juni 2007**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno W	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01 – 29</b>
Tujuan dan Peranan .....	01 – 04
Ruang Lingkup .....	05 – 08
Pemakai dan Kebutuhan Informasi .....	09 – 11
Paradigma Transaksi Syariah .....	12 – 14
Asas Transaksi Syariah .....	15 – 26
Karakteristik Transaksi Syariah .....	27 – 29
 <b>TUJUAN LAPORAN KEUANGAN .....</b>	 <b>30 - 40</b>
Posisi Keuangan, Kinerja dan Perubahan	
Posisi Keuangan .....	33 – 39
Catatan dan Skedul Tambahan .....	40
 <b>ASUMSI DASAR .....</b>	 <b>41 - 43</b>
Dasar Akrual .....	41 – 42
Kelangsungan Usaha .....	43
 <b>KARAKTERISTIK KUALITATIF</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>44 – 67</b>
Dapat Dipahami .....	45
Relevan .....	46 – 51
Materialitas .....	49 – 51
Keandalan .....	52 – 59
Penyajian Jujur .....	54 – 55
Substansi Mengungguli Bentuk .....	56
Netralitas .....	57
Pertimbangan Sehat .....	58
Kelengkapan .....	59
Dapat Dibandingkan .....	60 – 63

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal .....	64-66
Tepat Waktu .....	64
Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat .....	65
Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif .....	66
Penyajian Wajar .....	67
<b>UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>68 - 108</b>
Posisi Keuangan .....	71 – 74
Aset .....	75 - 81
Kewajiban .....	82 – 86
Dana Syirkah Temporer .....	87 – 91
Ekuitas .....	92 – 95
Kinerja .....	96 – 100
Penghasilan .....	101 – 104
Beban .....	105 – 107
Hak Pilih Ketiga atas Bagi Hasil .....	108
<b>PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>109 - 126</b>
Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan .....	112
Keandalan Pengukuran .....	113 – 115
Pengakuan Aset .....	116 – 117
Pengakuan Kewajiban .....	118
Pengakuan Dana Syirkah Temporer .....	119
Pengakuan Penghasilan .....	120 – 121
Pengakuan Beban .....	122 – 126
<b>PENGUKURAN UNSUR</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>127 - 131</b>

# 1 **KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN**

## 2 **LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

3

### 4 **PENDAHULUAN**

5

#### 6 **Tujuan dan Peranan**

7

8 1. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari  
9 penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para  
10 penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan  
11 sebagai acuan bagi:

12 (a) penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam  
13 pelaksanaan tugasnya;

14 (b) penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah  
15 akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar  
16 akuntansi keuangan syariah;

17 (c) auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah  
18 laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi  
19 syariah yang berlaku umum; dan

20 (d) para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan  
21 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang  
22 disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

23

24 2. Pengertian transaksi syariah yang dimaksud dalam  
25 kerangka dasar ini adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan  
26 prinsip syariah.

27

28 3. Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan  
29 dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk  
30 permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu.

31

32 4. Revisi kerangka dasar ini akan dilakukan dari waktu  
33 ke waktu sesuai dengan pengalaman badan penyusun standar  
34 akuntansi keuangan syariah dalam penggunaan kerangka dasar  
35 tersebut.

36

37

38

## 1 Ruang Lingkup

2

3 5. Kerangka dasar ini membahas:

4 (a) tujuan laporan keuangan;

5 (b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi  
6 dalam laporan keuangan; dan

7 (c) definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang  
8 membentuk laporan keuangan.

9

10 6. Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk  
11 tujuan umum (*general purpose financial statements*, yang  
12 selanjutnya hanya disebut “laporan keuangan”), termasuk  
13 laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan  
14 disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi  
15 kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara  
16 pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh  
17 informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan  
18 keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat  
19 tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama  
20 informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut  
21 seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan  
22 kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus  
23 seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan  
24 perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini.

25

26 7. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses  
27 pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi  
28 laporan keuangan atas kegiatan komersial dan atau sosial.  
29 Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan  
30 laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat  
31 disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan  
32 arus kas, atau laporan perubahan ekuitas), catatan dan laporan  
33 lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral  
34 dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial  
35 meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan  
36 laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di samping  
37 itu juga termasuk, skedul dan informasi tambahan yang berkaitan

38

1 dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen  
2 industri dan geografis.

3  
4 8. Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi  
5 syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah  
6 maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor  
7 swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang  
8 laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang  
9 mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber  
10 utama informasi keuangan entitas syariah. Entitas konvensional  
11 yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan  
12 laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya  
13 melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar  
14 akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional.

### 15 16 **Pemakai dan Kebutuhan Informasi**

17  
18 9. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang  
19 dan investor potensial; pemilik dana *qardh*; pemilik dana  
20 investasi *syirkah* temporer; pemilik dana titipan; pembayar dan  
21 penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf; pengawas syariah;  
22 karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan;  
23 pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat.  
24 Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi  
25 beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa  
26 kebutuhan ini meliputi:

- 27 (a) *Investor*. Investor dan penasehat berkepentingan dengan  
28 risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi  
29 yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi  
30 untuk membantu menentukan apakah harus membeli,  
31 menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang  
32 saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan  
33 mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk  
34 membayar dividen.
- 35 (b) *Pemberi dana qardh*. Pemberi dana *qardh* tertarik dengan  
36 informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk  
37 memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat  
38 jatuh tempo.

- 1 (c) *Pemilik dana syirkah temporer*. Pemilik dana *syirkah*  
2 temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan  
3 yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan  
4 investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan  
5 aman.
- 6 (d) *Pemilik dana titipan*. Pemilik dana titipan tertarik dengan  
7 informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk  
8 memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
- 9 (e) *Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan*  
10 *wakaf*. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan  
11 wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi  
12 mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 13 (f) *Pengawas syariah*. Pengawas syariah yang  
14 berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan  
15 pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
- 16 (g) *Karyawan*. Karyawan dan kelompok-kelompok yang  
17 mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai  
18 stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga  
19 tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka  
20 untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam  
21 memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan  
22 kerja.
- 23 (h) *Pemasok dan mitra usaha lainnya*. Pemasok dan mitra  
24 usaha lainnya tertarik dengan informasi yang  
25 memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah  
26 yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra  
27 usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang  
28 waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman *qardh*  
29 kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung  
30 pada kelangsungan hidup entitas syariah.
- 31 (i) *Pelanggan*. Para pelanggan berkepentingan dengan  
32 informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah,  
33 terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka  
34 panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
- 35 (j) *Pemerintah*. Pemerintah dan berbagai lembaga yang  
36 berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan  
37 alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan  
38 aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan

1 informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah,  
2 menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk  
3 menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik  
4 lainnya.

5 (k) *Masyarakat*. Entitas syariah mempengaruhi anggota  
6 masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah  
7 dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian  
8 nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan  
9 perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan  
10 keuangan dapat membantu masyarakat dengan  
11 menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan  
12 perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta  
13 rangkaian aktivitasnya.

14  
15 10. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan  
16 bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat  
17 memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para  
18 investor saham dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan  
19 penanam modal/dana berisiko ke entitas syariah, maka  
20 ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka  
21 juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.

22  
23 11. Manajemen entitas syariah memikul tanggung jawab  
24 utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan  
25 entitas syariah. Manajemen juga berkepentingan dengan  
26 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun  
27 memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan  
28 tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab  
29 perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.  
30 Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk  
31 dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi  
32 kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi  
33 semacam itu berada di luar ruang lingkup kerangka dasar ini.  
34 Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan  
35 didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang  
36 posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan.

37  
38

## 1 **Paradigma Transaksi Syariah**

2

3 12. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar  
4 bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah  
5 (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh  
6 umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara  
7 material dan spiritual (*al-falah*).

8

9 13. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat  
10 manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang  
11 menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter  
12 baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma  
13 ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya  
14 karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin  
15 pasar (*market discipline*) yang baik.

16

17 14. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang  
18 mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan  
19 larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal  
20 dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama  
21 makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan  
22 muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi  
23 semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan  
24 transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang  
25 berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar  
26 hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan  
27 harmonis.

28

## 29 **Asas Transaksi Syariah**

30

31 15. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip:

32 (a) persaudaraan (*ukhuwah*);

33 (b) keadilan (*'adalah*);

34 (c) kemaslahatan (*maslahah*);

35 (d) keseimbangan (*tawazun*); dan

36 (e) universalisme (*syumuliyah*).

37

38

1           16. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya  
2 merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan  
3 harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara  
4 umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi  
5 syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh  
6 manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh  
7 mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah  
8 dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal  
9 (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong  
10 (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan  
11 beraliansi (*tahaluf*).

12  
13           17. Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan  
14 sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya  
15 pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai  
16 posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa  
17 aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- 18 (a) riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik  
19 riba *nasiah* maupun *fadh*l);  
20 (b) kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain,  
21 maupun lingkungan);  
22 (c) *maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif);  
23 (d) *gharar* (unsur ketidakjelasan); dan  
24 (e) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta  
25 aktivitas operasional yang terkait).

26  
27           18. Esensi riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang  
28 yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang  
29 serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti  
30 murabahah tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan  
31 dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi  
32 termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis  
33 secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara  
34 tidak tunai.

35  
36           19. Esensi kezaliman (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu  
37 tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran,  
38 kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya

1 dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman  
2 dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara  
3 keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa  
4 kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang  
5 melakukan transaksi.

6

7 20. Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat  
8 spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta  
9 bersifat perjudian (*gambling*).

10

11 21. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi  
12 merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur  
13 ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak  
14 adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar*  
15 antara lain:

16 (a) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek  
17 akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah  
18 ada maupun belum ada;

19 (b) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan  
20 penjual;

21 (c) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas  
22 barang/jasa;

23 (d) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar  
24 dan alat pembayaran;

25 (e) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;

26 (f) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya  
27 dengan yang ditentukan dalam transaksi;

28 (g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi  
29 yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau  
30 ketidakpahaman yang ditransaksikan.

31

32 22. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara  
33 tegas dalam Al Quran dan As Sunah.

34

35 23. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya  
36 merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang  
37 berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta  
38 individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus

1 memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta  
2 bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua  
3 aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan  
4 kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat  
5 harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi  
6 tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa  
7 pemeliharaan terhadap:  
8 (a) akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);  
9 (b) akal (*'aql*);  
10 (c) keturunan (*nasl*);  
11 (d) jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan  
12 (e) harta benda (*mal*).

13  
14 24. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi  
15 keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan  
16 publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan  
17 keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi  
18 syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi  
19 keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik  
20 (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya  
21 difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua  
22 pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan  
23 ekonomi.

24  
25 25. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat  
26 dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang  
27 berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku,  
28 agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan  
29 semesta (*rahmatan lil alamin*).

30  
31 26. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi  
32 aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara  
33 koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang  
34 merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

35  
36  
37  
38

## 1 Karakteristik Transaksi Syariah

2

3 27. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma  
4 dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan  
5 persyaratan sebagai berikut:

6 (a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling  
7 paham dan saling ridha;

8 (b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya  
9 halal dan baik (*thayib*);

10 (c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan  
11 pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;

12 (d) tidak mengandung unsur riba;

13 (e) tidak mengandung unsur kezaliman;

14 (f) tidak mengandung unsur *maysir*;

15 (g) tidak mengandung unsur *gharar*;

16 (h) tidak mengandung unsur haram;

17 (i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value*  
18 *of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan  
19 usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan  
20 usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil*  
21 *ghurmi (no gain without accompanying risk)*;

22 (j) transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas  
23 dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa  
24 merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan  
25 menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta  
26 tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang  
27 berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;

28 (k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan  
29 (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*);  
30 dan

31 (l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap  
32 (*risywah*).

33

34 28. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang  
35 bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat  
36 nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara  
37 lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli  
38

1 barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan  
2 jasa untuk mendapatkan imbalan.

3

4 29. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain  
5 berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*);  
6 penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak,  
7 sedekah, wakaf dan hibah.

8

## 9 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

10

11 30. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan  
12 informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta  
13 perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang  
14 bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan  
15 keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

16 (a) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam  
17 semua transaksi dan kegiatan usaha;

18 (b) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip  
19 syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan  
20 beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada,  
21 dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;

22 (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan  
23 tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam  
24 mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat  
25 keuntungan yang layak; dan

26 (d) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang  
27 diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah*  
28 temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban  
29 (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk  
30 pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan  
31 wakaf.

32

33 31. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini  
34 memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun  
35 demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua  
36 informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam  
37 pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum  
38 menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu,

1 dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi  
2 nonkeuangan.

3

4 32. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah  
5 dilakukan manajemen (*stewardship*), atau  
6 pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang  
7 dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang  
8 telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat  
9 demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi;  
10 keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk  
11 menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah  
12 atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti  
13 manajemen.

14

### 15 **Posisi Keuangan, Kinerja, dan Perubahan Posisi** 16 **Keuangan**

17

18 33. Keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan  
19 keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas syariah  
20 dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta  
21 kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan ini akhirnya  
22 menentukan, misalnya, kemampuan pembayaran kepada para  
23 karyawan dan para pemasok, pembayaran kewajiban dan  
24 pembagian penghasilan kepada para pemilik. Para pemakai  
25 dapat mengevaluasi kemampuan entitas syariah dalam  
26 menghasilkan kas (dan setara kas) dengan lebih baik kalau  
27 mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi  
28 keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan entitas  
29 syariah.

30

31 34. Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber  
32 daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan  
33 solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan  
34 lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan  
35 dan kemampuan entitas syariah dalam memodifikasi sumber  
36 daya ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan  
37 entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di  
38 masa depan. Informasi struktur keuangan berguna untuk

1 memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana  
2 penghasilan bersih (laba) dan arus kas di masa depan akan  
3 didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak di dalam  
4 entitas syariah; informasi tersebut juga berguna untuk  
5 memprediksi seberapa jauh entitas syariah akan berhasil  
6 meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi  
7 likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi  
8 kemampuan entitas syariah dalam pemenuhan komitmen  
9 keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan  
10 ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah  
11 memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan  
12 ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen  
13 pada saat jatuh tempo.

14

15 35. Informasi kinerja entitas syariah, terutama profitabilitas,  
16 diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya  
17 ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi  
18 fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi  
19 kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas entitas syariah  
20 dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.  
21 Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam  
22 perumusan pertimbangan tentang efektivitas entitas syariah  
23 dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

24

25 36. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah  
26 bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan  
27 operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi  
28 pemakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas  
29 syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta  
30 kebutuhan entitas syariah untuk memanfaatkan arus kas  
31 tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi  
32 keuangan, dana dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti,  
33 seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aktiva likuid atau  
34 kas. Kerangka dasar ini tidak mendefinisikan dana secara  
35 spesifik.

36

37 37. Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam  
38 neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan

1 laba rugi. Dalam laporan keuangan, informasi perubahan posisi  
2 keuangan dan laporan yang menjelaskan pemenuhan fungsi  
3 sosial entitas syariah disajikan dalam laporan tersendiri.

4

5 38. Informasi lain yang tidak diatur secara khusus tetapi  
6 relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna  
7 laporan keuangan hendaknya disajikan dalam laporan  
8 keuangan.

9

10 39. Komponen-komponen laporan keuangan saling terkait  
11 karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi  
12 transaksi atau peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap  
13 laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain,  
14 tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan  
15 tunggal atau menyediakan semua informasi yang diperlukan  
16 untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakai. Misalnya, laporan  
17 laba rugi menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang  
18 kinerja kecuali kalau digunakan dalam hubungannya dengan  
19 neraca dan laporan arus kas.

20

### 21 ***Catatan dan Skedul Tambahan***

22

23 40. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul  
24 tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut  
25 mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan  
26 kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula  
27 mencakupi pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian  
28 yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya  
29 dan kewajiban (*obligation*) yang tidak dicantumkan dalam  
30 neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen-segmen  
31 industri dan geografi serta pengaruhnya pada entitas syariah  
32 akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk  
33 informasi tambahan.

34

35

36

37

38

## 1 ASUMSI DASAR

2

### 3 Dasar Akrual

4

5 41. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun  
6 atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan  
7 peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat  
8 kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan  
9 dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan  
10 keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan  
11 yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada  
12 pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan  
13 penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban  
14 pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang  
15 merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh  
16 karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi  
17 transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna  
18 bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

19

20 42. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil  
21 usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian  
22 hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang  
23 dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).

24

### 25 Kelangsungan Usaha

26

27 43. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi  
28 kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan  
29 usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan  
30 tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi  
31 secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan  
32 tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun  
33 dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus  
34 diungkapkan.

35

36

37

38

## 1 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN**

## 2 **KEUANGAN**

3

4 44. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang  
5 membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi  
6 pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:  
7 dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

8

### 9 **Dapat Dipahami**

10

11 45. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam  
12 laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat  
13 dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan  
14 memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi  
15 dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari  
16 informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,  
17 informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan  
18 keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar  
19 pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat  
20 dipahami oleh pemakai tertentu.

21

### 22 **Relevan**

23

24 46. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk  
25 memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan  
26 keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat  
27 mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu  
28 mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa  
29 depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka  
30 di masa lalu.

31

32 47. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan  
33 penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya,  
34 informasi struktur dan besarnya aset-aset yang dimiliki  
35 bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan  
36 kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan  
37 bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama  
38 juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory*)

1 *role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana  
2 struktur keuangan entitas syariah diharapkan tersusun atau  
3 tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

4  
5 48. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu  
6 seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi  
7 keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung  
8 menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan  
9 upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas  
10 syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.  
11 Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam  
12 bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan  
13 keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan  
14 menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa  
15 lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan  
16 kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa,  
17 abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

18

### 19 ***Materialitas***

20

21 49. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan  
22 materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja  
23 sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya,  
24 pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian  
25 risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa  
26 mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen  
27 baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik  
28 hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya  
29 jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan  
30 entitas syariah.

31

32 50. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk  
33 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi  
34 tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang  
35 diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung  
36 pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan  
37 situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*)  
38 atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya,

1 materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik  
2 pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang  
3 harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

4

5 51. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus  
6 mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa  
7 mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialitas.

8

### 9 **Keandalan**

10

11 52. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*).  
12 Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian  
13 yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan  
14 pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful*  
15 *representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang  
16 secara wajar diharapkan dapat disajikan.

17

18 53. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau  
19 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan  
20 informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  
21 Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian  
22 dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin  
23 tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh  
24 tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk  
25 mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

26

### 27 ***Penyajian Jujur***

28

29 54. Agar dapat diandalkan, informasi harus  
30 menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya  
31 yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat  
32 diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus  
33 menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya  
34 dalam bentuk aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan  
35 ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi  
36 kriteria pengakuan.

37

38

1           55. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari  
2 risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang  
3 seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan  
4 karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan  
5 kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi  
6 serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun  
7 atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai  
8 dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus  
9 tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat  
10 tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak  
11 mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun  
12 dalam kegiatan usahanya entitas syariah dapat menghasilkan  
13 *goodwill*, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau  
14 mengukur *goodwill* secara andal. Namun, dalam kasus lain,  
15 pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan  
16 mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan  
17 pengakuan dan pengukurannya.

18

### 19 ***Substansi Mengungguli Bentuk***

20

21           56. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan  
22 jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,  
23 maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai  
24 dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk  
25 hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu  
26 konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

27

### 28 ***Netralitas***

29

30           57. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum  
31 pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan  
32 pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan  
33 informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal  
34 tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai  
35 kepentingan yang berlawanan.

36

37

38

## 1 ***Pertimbangan Sehat***

2

3       58. Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi  
4 ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti  
5 ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat  
6 pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang  
7 mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan  
8 mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan  
9 menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam  
10 penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat  
11 mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan  
12 prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau  
13 penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau  
14 beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian  
15 penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,  
16 misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan  
17 (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau  
18 penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau  
19 beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi  
20 tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

21

## 22 ***Kelengkapan***

23

24       59. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan  
25 keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.  
26 Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*)  
27 mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan  
28 dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna  
29 ditinjau dari segi relevansi.

30

## 31 **Dapat Dibandingkan**

32

33       60. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan  
34 keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi  
35 kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai  
36 juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar  
37 entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja  
38 serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena

1 itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi  
2 dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten  
3 untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah  
4 yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan  
5 entitas lain.

6

7 61. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat  
8 diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat  
9 informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam  
10 penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta  
11 pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus  
12 dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan  
13 kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta  
14 peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari  
15 satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda.  
16 Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk  
17 pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas  
18 syariah, membantu pencapaian daya banding.

19

20 62. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan  
21 dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya  
22 menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi  
23 keuangan syariah yang lebih baik. Entitas syariah tidak perlu  
24 meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan  
25 karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas syariah  
26 juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi  
27 kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

28

29 63. Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi  
30 keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar  
31 periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode  
32 sebelumnya dalam laporan keuangan.

33

34

35

36

37

38

## 1 **Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

2

### 3 ***Tepat Waktu***

4

5 64. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam  
6 pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan  
7 relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan  
8 manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan  
9 informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu,  
10 seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi  
11 atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi  
12 keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai  
13 seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin  
14 sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil  
15 keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara  
16 relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan  
17 merupakan pertimbangan yang menentukan.

18

### 19 ***Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat***

20

21 65. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih  
22 merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (*pervasive*)  
23 daripada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan  
24 informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun  
25 demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat  
26 merupakan suatu proses pertimbangan (*judgement process*).  
27 Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat.  
28 Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping  
29 mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Karena  
30 alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat  
31 pada kasus tertentu. Namun demikian, dewan penyusun standar  
32 akuntansi syariah, seperti juga para penyusun dan pemakai  
33 laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

34

### 35 ***Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif***

36

37 66. Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di antara  
38 berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada

1 umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu  
2 keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk  
3 memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari  
4 berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda  
5 merupakan masalah pertimbangan profesional.

6

## 7 **Penyajian Wajar**

8

9 67. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan  
10 pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar,  
11 posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu  
12 entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani  
13 secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik  
14 kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai  
15 biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan  
16 apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan  
17 yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi  
18 semacam itu.

19

## 20 **UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

21

22 68. Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas  
23 syariah antara lain meliputi:

24 (a) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan  
25 komersial:

26 (i) laporan posisi keuangan;

27 (ii) laporan laba rugi;

28 (iii) laporan arus kas; dan

29 (iv) laporan perubahan ekuitas.

30 (b) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan  
31 sosial:

32 (i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan

33 (ii) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

34 (c) komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan  
35 kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah  
36 tersebut.

37

38

1           69. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan  
2 dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam  
3 beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.  
4 Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur  
5 yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi  
6 keuangan adalah aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan  
7 ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran  
8 kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.  
9 Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan  
10 berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai  
11 unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak  
12 mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan  
13 secara khusus.

14

15           70. Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan  
16 laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aset dan  
17 kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakekat atau  
18 fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk  
19 menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi  
20 pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

21

## 22 **Posisi Keuangan**

23

24           71. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan  
25 pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana  
26 *syirkah* temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai  
27 berikut:

28 (a) *Aset* adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah  
29 sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana  
30 manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh  
31 entitas syariah.

32 (b) *Kewajiban* merupakan hutang entitas syariah masa kini  
33 yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya  
34 diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya  
35 entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

36 (c) *Dana syirkah temporer* adalah dana yang diterima  
37 sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari  
38 individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah

1            mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan  
2            dana tersebut dengan pembagian hasil investasi  
3            berdasarkan kesepakatan.

4    (d) *Ekuitas* adalah hak residual atas aset entitas syariah  
5            setelah dikurangi semua kewajiban dan dana *syirkah*  
6            temporer.

7  
8            72. Definisi aset dan kewajiban mengidentifikasi ciri  
9            esensialnya tetapi tidak mencoba untuk menspesifikasikan  
10           kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam neraca.  
11           Jadi, definisi tersebut mencakup pos-pos yang tidak diakui  
12           sebagai aset atau kewajiban di dalam neraca karena tidak  
13           memenuhi kriteria untuk diakui seperti yang dibahas dalam  
14           paragraf 109 sampai 126. Khususnya, harapan bahwa manfaat  
15           ekonomi di masa depan akan mengalir dari atau ke dalam entitas  
16           syariah harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas  
17           dalam paragraf 112 sebelum suatu aset atau kewajiban diakui.

18  
19           73. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi  
20           aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer atau ekuitas, perhatian  
21           perlu ditujukan pada substansi yang mendasari, serta realitas  
22           ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

23  
24           74. Neraca yang disusun menurut standar akuntansi  
25           keuangan syariah yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak  
26           memenuhi definisi aset atau kewajiban dan tidak disajikan  
27           sebagai bagian dari dana *syirkah* temporer atau ekuitas. Namun  
28           demikian, definisi yang dirumuskan dalam paragraf 71 akan  
29           mendasari peninjauan kembali terhadap standar akuntansi  
30           keuangan syariah yang berlaku di masa depan dan perumusan  
31           standar selanjutnya.

32  
33    **Aset**

34  
35           75. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam  
36           aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan  
37           sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas  
38           dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat

1 berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari  
2 aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk  
3 sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau  
4 berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas,  
5 seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi  
6 alternatif.

7

8 76. Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk  
9 memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan  
10 kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau  
11 jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini,  
12 pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan  
13 sumbangan kepada arus kas entitas syariah. Kas sendiri  
14 memberikan jasa kepada entitas syariah karena kekuasaannya  
15 terhadap sumber daya yang lain.

16

17 77. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam  
18 aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa  
19 cara. Misalnya, aset dapat:

- 20 (a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam  
21 produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah;  
22 (b) dipertukarkan dengan aset lain;  
23 (c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau  
24 (d) dibagikan kepada para pemilik entitas syariah.

25

26 78. Banyak aset, misalnya, aset tetap memiliki bentuk fisik.  
27 Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk  
28 menentukan eksistensi aset; karena itu, paten dan hak cipta,  
29 misalnya, merupakan aset kalau manfaat ekonomi yang  
30 diperoleh entitas syariah di masa depan dan kalau masing-  
31 masing aset tersebut dikuasai entitas syariah.

32

33 79. Banyak aset, misalnya, piutang dan properti,  
34 dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik.  
35 Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial;  
36 jadi, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa adalah aset  
37 jika entitas syariah mengendalikan manfaat yang diharapkan  
38 dari properti tersebut. Meskipun kemampuan entitas syariah

1 untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak  
2 menurut hukum suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi  
3 aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya,  
4 pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan  
5 dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan  
6 pengetahuan tersebut, entitas syariah menikmati manfaat yang  
7 diharapkan dari pengetahuan tersebut.

8  
9 80. Aset entitas syariah berasal dari transaksi atau peristiwa  
10 lain yang terjadi di masa lalu. Entitas syariah biasanya  
11 memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi  
12 transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset;  
13 misalnya properti yang diterima entitas syariah dari pemerintah  
14 sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan  
15 ekonomi dalam suatu wilayah. Transaksi atau peristiwa yang  
16 diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya  
17 memunculkan aset; oleh karena itu, misalnya, maksud untuk  
18 membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi  
19 aset.

20  
21 81. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan  
22 timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi  
23 bersamaan. Oleh karena itu, kalau entitas syariah melakukan  
24 pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa entitas  
25 syariah tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum  
26 merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang  
27 memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan  
28 tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak  
29 mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset  
30 dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui  
31 pencantumannya dalam neraca; misalnya, barang atau jasa yang  
32 telah didonasikan kepada entitas syariah memenuhi definisi aset.

### 33 34 **Kewajiban**

35  
36 82. Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah  
37 bahwa entitas syariah mempunyai kewajiban (*obligation*) masa  
38 kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk

1 bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara  
2 tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
3 konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan.  
4 Ini biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlah  
5 yang terhutang dari barang dan jasa yang telah diterima. Namun,  
6 kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim, kebiasaan  
7 dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik  
8 atau bertindak dengan cara yang adil. Kalau, misalnya, sebagai  
9 suatu kebijakan, entitas syariah memutuskan untuk menarik  
10 kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi  
11 sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan  
12 dibayarkan tersebut merupakan kewajiban.

13

14 83. Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban  
15 sekarang dan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen  
16 entitas syariah untuk membeli aset di masa depan tidak dengan  
17 sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban  
18 biasanya timbul hanya kalau aset telah diserahkan atau entitas  
19 syariah telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan  
20 untuk membeli aset. Pada kasus yang terakhir, hakekat  
21 perjanjian yang tak dapat dibatalkan berarti bahwa konsekuensi  
22 ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya,  
23 karena adanya hukuman yang substansial, membuat entitas  
24 syariah memiliki sedikit pilihan, itu pun kalau ada, untuk  
25 mencegah pengeluaran sumber daya kepada pihak lain.

26

27 84. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya  
28 melibatkan entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya  
29 yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi  
30 tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang  
31 dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:

- 32 (a) pembayaran kas;
- 33 (b) penyerahan aset lain;
- 34 (c) pemberian jasa;
- 35 (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain;
- 36 atau
- 37 (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas.

38

1 Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti  
2 kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

3  
4 85. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa  
5 lalu. Jadi, misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa  
6 menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau dibayar di muka atau  
7 pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman menimbulkan  
8 kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Entitas  
9 syariah juga dapat mengakui sebagai kewajiban jumlah rabat  
10 masa depan yang didasarkan pada jumlah pembelian tahunan  
11 para pelanggan; dalam kasus ini, penjualan barang masa lalu  
12 merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban.

13  
14 86. Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan  
15 menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial.  
16 Beberapa entitas syariah menyebut kewajiban ini sebagai  
17 penyisihan (*provision*). Dalam pengertian sempit, penyisihan  
18 semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena hanya  
19 mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat  
20 estimasi. Definisi kewajiban dalam paragraf 71 mengikuti  
21 pendekatan luas. Jadi, kalau penyisihan menyangkut kewajiban  
22 masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut,  
23 maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun  
24 jumlahnya harus diestimasi. Contohnya adalah penyisihan untuk  
25 pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan  
26 dan penyisihan untuk menutup kewajiban manfaat pensiun.

### 27 28 **Dana *Syirkah* Temporer**

29  
30 87. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh  
31 entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk  
32 mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan  
33 kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari  
34 pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan  
35 kesepakatan; sedangkan dalam hal dana *syirkah* temporer  
36 berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari  
37 unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran  
38 kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban

1 mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana  
2 tersebut. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah  
3 penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*,  
4 *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang  
5 sejenis.

6  
7 88. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan  
8 sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak  
9 berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk  
10 mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali  
11 akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain,  
12 dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas  
13 karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak  
14 mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang  
15 saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan  
16 yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi (*current*  
17 *and other non investment accounts*).

18  
19 89. Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana  
20 *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan  
21 akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*  
22 atau *musyarakah*. Entitas syariah mempunyai hak untuk  
23 mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan  
24 atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek  
25 investasi.

26  
27 90. Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur  
28 neraca dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang  
29 memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola dan  
30 menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana  
31 dimaksud dengan dana lainnya.

32  
33 91. Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian  
34 atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian  
35 berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian  
36 hasil dana *syirkah* temporer dapat dengan konsep bagi hasil  
37 atau bagi untung.

38

## 1 **Ekuitas**

2

3 92. Meskipun dalam paragraf 71, didefinisikan sebagai  
4 residual, ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca.  
5 Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para  
6 pemegang saham, saldo laba (*retained earnings*), penyisihan  
7 saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal  
8 masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam  
9 itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan  
10 keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut  
11 mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya  
12 terhadap kemampuan entitas syariah untuk membagikan atau  
13 menggunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat  
14 merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak  
15 kepemilikannya masing-masing dalam entitas syariah  
16 mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan  
17 penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal.

18

19 93. Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan  
20 oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku untuk  
21 memberikan perlindungan tambahan kepada entitas syariah dan  
22 para krediturnya terhadap kerugian yang ditimbulkan.  
23 Cadangan yang lain dapat dibentuk kalau hukum pajak  
24 memberikan pembebasan dari, atau pengurangan dalam  
25 kewajiban pajak pada waktu dilakukan pemindahan ke  
26 cadangan semacam itu. Eksistensi serta besarnya cadangan  
27 menurut peraturan perundangan yang berlaku ini merupakan  
28 informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan  
29 bagi para pemakai laporan keuangan. Pemindahan ke cadangan  
30 tersebut lebih merupakan penyisihan saldo laba daripada beban.

31

32 94. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca  
33 tergantung pada pengukuran aset, kewajiban dan dana *syirkah*  
34 temporer. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah  
35 ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan  
36 (*aggregate market value*) dari saham entitas syariah atau  
37 jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset  
38 bersih entitas syariah baik satu persatu (*liquidating value*)

1 atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha  
2 (*going concern value*).

3

4 95. Aktivitas bisnis sering dilakukan melalui beberapa  
5 bentuk entitas syariah seperti entitas perseorangan, persekutuan  
6 dan *trust*, serta badan usaha milik negara. Kerangka hukum  
7 bagi berbagai entitas syariah semacam itu seringkali berbeda  
8 dengan yang berlaku bagi perseroan terbatas. Misalnya,  
9 mungkin hanya sedikit saja, walaupun ada, pembatasan-  
10 pembatasan terhadap pembagian jumlah yang tergolong dalam  
11 ekuitas kepada para pemilik atau pihak iain. Namun demikian,  
12 definisi ekuitas dan aspek-aspek lain dalam kerangka dasar  
13 yang mengatur ekuitas berlaku untuk entitas syariah semacam  
14 itu.

15

## 16 **Kinerja**

17

18 96. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai  
19 ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti  
20 imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per  
21 saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan  
22 dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah  
23 penghasilan dan beban.

24

25 97. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai  
26 berikut:

27 (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi  
28 selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan  
29 atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang  
30 mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari  
31 kontribusi penanam modal.

32 (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi  
33 selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar  
34 atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang  
35 mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut  
36 pembagian kepada penanam modal.

37

38

1           98. Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi  
2 ciri-ciri esensial namun tidak mencoba untuk  
3 mengidentifikasi kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui  
4 dalam laporan laba rugi. Kriteria pengakuan penghasilan dan  
5 beban dibahas dalam paragraf 109 sampai dengan 126.

6  
7           99. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan  
8 laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk  
9 menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan  
10 keputusan ekonomi. Misalnya, perbedaan antara pos  
11 penghasilan dan beban yang berasal dan tidak berasal dari  
12 pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa (*ordinary*)  
13 merupakan praktek yang lazim. Perbedaan ini dilakukan  
14 berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah  
15 relevan dalam mengevaluasi kemampuan entitas syariah untuk  
16 menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan; misalnya,  
17 aktivitas insidental seperti pengalihan investasi jangka panjang  
18 tampaknya tidak akan terjadi secara reguler. Pada waktu  
19 membedakan pos dengan cara ini perlu dipertimbangkan  
20 hakekat entitas syariah dan operasinya. Pos yang timbul dari  
21 aktivitas yang biasa bagi suatu entitas syariah mungkin tidak  
22 biasa bagi entitas syariah dan entitas lain.

23  
24           100. Perbedaan antara pos penghasilan dan beban dan  
25 penggabungan pos tersebut dengan cara berbeda juga  
26 memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja entitas  
27 syariah, masing-masing dengan derajat cakupan yang berbeda.  
28 Misalnya, laporan laba rugi dapat menyajikan laba kotor, laba  
29 bersih dari aktivitas biasa sebelum pajak, laba bersih dari  
30 aktivitas biasa setelah pajak, dan laba bersih.

## 31 32 **Penghasilan**

33  
34           101. Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik  
35 pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*).  
36 Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah  
37 yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti  
38

1 penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bagi hasil, dividen, royalti  
2 dan sewa.

3  
4 102. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang  
5 memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin  
6 tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang  
7 biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi  
8 dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan  
9 pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang  
10 sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

11  
12 103. Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam  
13 pengalihan aset tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi  
14 keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari  
15 revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan  
16 dari kenaikan jumlah aset jangka panjang. Kalau diakui dalam  
17 laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah  
18 karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam  
19 pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya  
20 dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban  
21 yang bersangkutan.

22  
23 104. Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah  
24 karena penghasilan; misalnya kas, piutang serta barang dan  
25 jasa yang diterima sebagai penukar dari barang dan jasa yang  
26 dipasok. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian  
27 kewajiban. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang  
28 dan jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman.

## 29 30 **Beban**

31  
32 105. Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun  
33 beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah  
34 yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas  
35 entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok  
36 penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya  
37 berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan  
38 setara kas), persediaan dan aset tetap.

1           106. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi  
2 definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul  
3 dari aktivitas entitas syariah yang biasa. Kerugian tersebut  
4 mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada  
5 hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu,  
6 kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka  
7 dasar ini.

8  
9           107. Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana  
10 kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset  
11 tidak lancar. Definisi beban juga mencakupi kerugian yang  
12 belum direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh  
13 peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan  
14 pinjaman entitas syariah dalam mata uang tersebut. Kalau  
15 kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan  
16 secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut  
17 berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.  
18 Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih setelah  
19 dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.

## 20 21 **Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil**

22  
23           108. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah*  
24 temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan  
25 dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu  
26 periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil  
27 tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau  
28 pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi  
29 hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada  
30 pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan  
31 entitas syariah.

## 32 33 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

34  
35           109. Pengakuan (*recognition*) merupakan proses  
36 pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta  
37 kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam  
38 neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan

1 menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam  
2 jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau  
3 laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus  
4 diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk  
5 mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui  
6 pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun  
7 melalui catatan atau materi penjelasan.

8

9 110. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui  
10 kalau:

- 11 (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan  
12 dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam  
13 entitas syariah; dan  
14 (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur  
15 dengan andal.

16

17 111. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria  
18 ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan  
19 laba rugi, perhatian perlu ditujukan pada pertimbangan  
20 materialitas yang dibahas dalam paragraf 49 sampai dengan  
21 51. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang  
22 memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu,  
23 misalnya, suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan  
24 unsur lain, misalnya, penghasilan atau kewajiban.

25

### 26 ***Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan***

27

28 112. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep  
29 probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian  
30 bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan  
31 pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah.  
32 Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian  
33 lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat  
34 ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa  
35 depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat  
36 penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran  
37 suatu piutang besar kemungkinan terjadi (*probable*) dan tidak  
38 ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk

1 mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika  
2 populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan  
3 ada yang tidak tertagih; karena itu suatu beban yang  
4 merepresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang  
5 diharapkan harus diakui.

6

### 7 ***Keandalan Pengukuran***

8

9 113. Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada  
10 tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat  
11 keandalan tertentu (*reliable*) seperti yang dibahas pada  
12 paragraf 52 sampai dengan paragraf 59 kerangka dasar ini.  
13 Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi;  
14 penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial  
15 dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat  
16 keandalan. Namun demikian, kalau estimasi yang layak tak  
17 mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau  
18 laporan laba rugi. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu  
19 tuntutan hukum dapat memenuhi definisi baik aset dan  
20 penghasilan maupun kriteria probabilitas untuk dapat diakui;  
21 namun demikian, kalau tidak mungkin diukur dengan tingkat  
22 keandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat diakui sebagai  
23 aset atau sebagai penghasilan; namun demikian, eksistensi  
24 tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan  
25 atau skedul tambahan.

26

27 114. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat  
28 memenuhi kriteria pengakuan dalam paragraf 110 dapat  
29 memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat  
30 dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

31

32 115. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu  
33 unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap  
34 perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul  
35 tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan kalau  
36 pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk  
37 mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi  
38 keuangan suatu entitas syariah oleh pemakai laporan keuangan.

## 1 ***Pengakuan Aset***

2

3 116. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan  
4 bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas  
5 syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang  
6 dapat diukur dengan andal.

7

8 117. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran  
9 telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin  
10 mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi  
11 berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan  
12 pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan  
13 ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen  
14 mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat  
15 ekonomi bagi entitas syariah di masa depan atau bahwa  
16 manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa  
17 tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima entitas  
18 syariah setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk  
19 membenarkan pengakuan aset.

20

## 21 ***Pengakuan Kewajiban***

22

23 118. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar  
24 kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang  
25 mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk  
26 menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang dan jumlah  
27 yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam  
28 praktek, kewajiban (*obligation*) menurut kontrak yang belum  
29 dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas  
30 pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak  
31 diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Namun  
32 demikian, kewajiban (*obligation*) semacam itu dapat memenuhi  
33 definisi kewajiban dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria  
34 pengakuan terpenuhi, maka kewajiban (*obligation*) tersebut  
35 dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini,  
36 pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau  
37 beban yang bersangkutan.

38

## 1 ***Pengakuan Dana Syirkah Temporer***

2

3 119. Pengakuan dana *syirkah* temporer dalam neraca  
4 hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban  
5 untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran  
6 sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah  
7 yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah  
8 dana *syirkah* temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari  
9 investasinya.

10

## 11 ***Pengakuan Penghasilan***

12

13 120. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau  
14 kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan  
15 dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi  
16 dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan  
17 penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset  
18 atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang  
19 timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban  
20 yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus  
21 dibayar).

22

23 121. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktek untuk  
24 mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa  
25 penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria  
26 pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini  
27 pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan  
28 penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan  
29 memiliki derajat kepastian yang cukup.

30

## 31 ***Pengakuan Beban***

32

33 122. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan  
34 manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan  
35 penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan  
36 dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi  
37 bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau

38

1 penurunan aset (misalnya, akrual hak karyawan atau  
2 penyusutan aset tetap).

3

4 123. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar  
5 hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos  
6 penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya  
7 disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs*  
8 *with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan  
9 beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara  
10 langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain  
11 yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang  
12 membentuk beban pokok penjualan (*cost or expense of goods*  
13 *sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang  
14 diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan  
15 konsep *matching* dalam kerangka dasar ini tidak  
16 memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak  
17 memenuhi definisi aset atau kewajiban.

18

19 124. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama  
20 beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan  
21 penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak  
22 langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar  
23 prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering  
24 diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan  
25 penggunaan aset, seperti aset tetap, *goodwill*, paten dan merek  
26 dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut  
27 penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan  
28 untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati  
29 manfaat ekonomi aset yang bersangkutan.

30

31 125. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau  
32 pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan  
33 atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak  
34 memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui  
35 dalam neraca sebagai aset.

36

37

38

1           126. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat  
2 timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila  
3 timbul kewajiban akibat garansi produk.

4

## 5 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

6

7           127. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang  
8 untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan  
9 keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini  
10 menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

11

12           128. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan  
13 dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan  
14 keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai  
15 berikut:

16 (a) Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau  
17 setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari  
18 imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk  
19 memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban  
20 dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari  
21 kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu  
22 (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau  
23 setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk  
24 memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang  
25 normal.

26 (b) Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas  
27 (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang  
28 sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban  
29 dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak  
30 didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan  
31 diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*)  
32 sekarang.

33 (c) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*).  
34 Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang  
35 dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam  
36 pele-pasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban  
37 dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas  
38 (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang

1           diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban  
2           dalam pelaksanaan usaha normal.

3  
4           129. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas  
5 syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya  
6 historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran  
7 yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar  
8 nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (*lower*  
9 *of cost or net realizable value*), atau akuntansi dana pensiun  
10 menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

11  
12           130. Penggunaan pengukuran nilai realisasi/penyelesaian  
13 untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan  
14 revaluasi secara periodik atas aset, kewajiban dan dana *syirkah*  
15 temporer. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal  
16 dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin keandalan serta dapat  
17 dibandingkan, manajemen harus menggunakan seluruh prinsip-  
18 prinsip berikut selama merevaluasi aset, kewajiban dan dana  
19 *syirkah* temporer:

- 20 (a) Adanya indikator eksternal, seperti harga pasar, yang  
21 tersedia secara luas.  
22 (b) Utilisasi seluruh informasi yang relevan baik positif atau  
23 negatif.  
24 (c) Utilisasi metode-metode penilaian yang logis dan relevan.  
25 (d) Konsistensi penggunaan metode-metode penilaian yang  
26 digunakan.  
27 (e) Utilisasi penggunaan ahli-ahli penilai yang tersedia secara  
28 luas.  
29 (f) Konservatisme dalam proses penilaian sesuai objektivitas  
30 dan netralitas dalam pemilihan nilai-nilai.

31  
32           131. Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai aset,  
33 kewajiban dan dana *syirkah* temporer, namun penggunaan  
34 konsep pengukuran nilai realisasi/penyelesaian tidak mudah  
35 diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai  
36 realisasi/penyelesaian dapat diterapkan untuk tujuan penyajian  
37 informasi tambahan yang relevan dengan suatu pos investasi  
38 yang telah ada atau yang prospektif. Namun, penyajian informasi

1    **tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk**  
2    **mendistribusikan hasil investasi yang belum terealisasi.**  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38